



## GUBERNUR ACEH

### PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH TAHUN 2023-2026

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan ketentuan Diktum Keempat Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah bagi Daerah dengan masa Jabatan Kepala Daerah berakhir pada Tahun 2022, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Aceh Tahun 2023-2026;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
  3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
  5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
  6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  8. Undang..../2

8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5696) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12 ) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2018 Perubahan Ketiga Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2018 Nomor 7 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 102);
15. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh Tahun 2012-2032 (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 46);
16. Qanun Aceh Nomor 19 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Aceh Tahun 2013-2023 (Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 62);
17. Qanun..../3

- o. Dinas Pertanahan Aceh;
- p. Dinas Registrasi Kependudukan Aceh;
- q. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh;
- r. Dinas Perhubungan Aceh;
- s. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh;
- t. Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Aceh;
- u. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh;
- v. Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh;
- w. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh;
- x. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh;
- y. Dinas Pendidikan Dayah Aceh;
- z. Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh;
- aa. Keurukon Katibul Wali Aceh;
- bb. Sekretariat Majelis Adat Aceh;
- cc. Dinas Syariat Islam Aceh;
- dd. Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh;
- ee. Sekretariat Baitul Mal Aceh;
- ff. Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh;
- gg. Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh;
- hh. Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh;
- ii. Dinas Peternakan Aceh;
- jj. Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh;
- kk. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh;
- ll. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh;
- mm. Inspektorat Aceh;
- nn. Badan Perencanaan dan Pembangunan Aceh;
- oo. Badan Pengelolaan Keuangan Aceh;
- pp. Badan Kepegawaian Aceh;
- qq. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;
- rr. Badan Penghubung Pemerintah Aceh;
- ss. Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh;
- tt. Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Aceh;
- uu. Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh;
- vv. Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Aceh;
- ww. Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh;
- xx. Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh;
- yy. Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Aceh;
- zz. Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah Aceh;
- aaa. Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh;
- bbb. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh; dan
- ccc. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh.

- (2) Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

**BAB III**  
**SISTEMATIKA, ISI DAN URAIAN**

**Pasal 4**

- (1) Renstra SKPA Tahun 2023-2026 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- a. BAB I : PENDAHULUAN
  - b. BAB II : GAMBARAN UMUM PELAYANAN SKPA
  - c. BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS SKPA
  - d. BAB IV : TUJUAN DAN SASARAN
  - e. BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
  - f. BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
  - g. BAB VII : KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
  - h. BAB VIII : PENUTUP
- (2) Isi beserta uraian Renstra SKPA Tahun 2023-2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

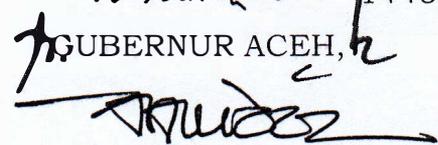
**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 5**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 20 Juni 2022  
20 Dzul qaidah 1443

  
GUBERNUR ACEH,

**NOVA IRIANSYAH**

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal, 20 Juni 2022  
20 Dzul qaidah 1443

  
SEKRETARIS DAERAH ACEH,

**TAQWALLAH**

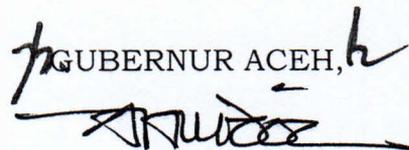
LAMPIRAN  
 PERATURAN GUBERNUR ACEH  
 NOMOR 20 TAHUN 2022  
 TENTANG RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA  
 PERANGKAT ACEH TAHUN 2023-2026.-----

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT ACEH  
 TAHUN 2023-2026

| No. | NOMOR RENJA SKPA             | SKPA  | Keterangan |
|-----|------------------------------|---|------------|
| 1   | 2                            | 3   | 4          |
| 1   | Renstra/Disdik/01/2022       | Dinas Pendidikan Aceh                                       |            |
| 2   | Renstra/Dinkes/02/2022       | Dinas Kesehatan Aceh  |            |
| 3   | Renstra/RSUZA/03/2022        | BLUD Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin             |            |
| 4   | Renstra/RSJ/04/2022          | BLUD Rumah Sakit Jiwa Aceh                                  |            |
| 5   | Renstra/RSIA/05/2022         | BLUD Rumah Sakit Ibu dan Anak Aceh                          |            |
| 6   | Renstra/PUPR/06/2022         | Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Aceh                |            |
| 7   | Renstra/Pengairan/07/2022    | Dinas Pengairan Aceh  |            |
| 8   | Renstra/Perkim/08/2022       | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Aceh          |            |
| 9   | Renstra/Satpol.PP.WH/09/2022 | Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Aceh        |            |
| 10  | Renstra/BPBA/10/2022         | Badan Penanggulangan Bencana Aceh                           |            |
| 11  | Renstra/Dinsos/11/2022       | Dinas Sosial Aceh   |            |
| 12  | Renstra/Naker/12/2022        | Dinas Tenaga Kerja dan Mobilitas Penduduk Aceh              |            |
| 13  | Renstra/DP3A/13/2022         | Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Aceh     |            |
| 14  | Renstra/Pangan/14/2022       | Dinas Pangan Aceh   |            |
| 15  | Renstra/Tanah/15/2022        | Dinas Pertanahan Aceh                                       |            |
| 16  | Renstra/DRKA/16/2022         | Dinas Registrasi Kependudukan Aceh                          |            |
| 17  | Renstra/DPMGA/17/2022        | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Gampong Aceh              |            |
| 18  | Renstra/Dishub/18/2022       | Dinas Perhubungan Aceh                                      |            |
| 19  | Renstra/Kominsa/19/2022      | Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Aceh           |            |
| 20  | Renstra/Kop.UKM/20/2022      | Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Aceh               |            |
| 21  | Renstra/DPMP2TA/21/2022      | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Aceh |            |
| 22  | Renstra/Dispورا/22/2022      | Dinas Pemuda dan Olahraga Aceh                              |            |
| 23  | Renstra/Disbudpar/23/2022    | Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Aceh                        |            |
| 24  | Renstra/Arpus/24/2022        | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Aceh                       |            |
| 25  | Renstra/DPDA/25/2022         | Dinas Pendidikan Dayah Aceh                                 |            |
| 26  | Renstra/MPA/26/2022          | Sekretariat Majelis Pendidikan Aceh                         |            |
| 27  | Renstra/KKW/27/2022          | Keurukon Katibul Wali Aceh                                  |            |
| 28  | Renstra/MAA/28/2022          | Sekretariat Majelis Adat Aceh                               |            |

| No. | NOMOR RENJA SKPA            | SKPA   | Keterangan |
|-----|-----------------------------|--|------------|
| 1   | 2                           | 3  | 4          |
| 29  | Renstra/Dinsyar/29/2022     | Dinas Syariat Islam Aceh   |            |
| 30  | Renstra/MPU/30/2022         | Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh                             |            |
| 31  | Renstra/BMA/31/2022         | Sekretariat Baitul Mal Aceh  |            |
| 32  | Renstra/BRA/32/2022         | Sekretariat Badan Reintegrasi Aceh   |            |
| 33  | Renstra/DKP/33/2022         | Dinas Kelautan dan Perikanan Aceh  |            |
| 34  | Renstra/Tanbun/34/2022      | Dinas Pertanian dan Perkebunan Aceh  |            |
| 35  | Renstra/Disnak/35/2022      | Dinas Peternakan Aceh  |            |
| 36  | Renstra/DLHK/36/2022        | Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Aceh                                  |            |
| 37  | Renstra/ESDM/37/2022        | Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Aceh                                  |            |
| 38  | Renstra/Indag/38/2022       | Dinas Perindustrian dan Perdagangan Aceh                                   |            |
| 39  | Renstra/Inspektorat/39/2022 | Inspektorat Aceh   |            |
| 40  | Renstra/BAPPEDA/40/2022     | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh                                  |            |
| 41  | Renstra/BPKA/41/2022        | Badan Pengelolaan Keuangan Aceh  |            |
| 42  | Renstra/BKA/42/2022         | Badan Kepegawaian Aceh   |            |
| 43  | Renstra/BPSDM/43/2022       | Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh                                |            |
| 44  | Renstra/BPPA/44/2022        | Badan Penghubung Pemerintah Aceh   |            |
| 45  | Renstra/Ro.Umum/45/2022     | Biro Umum Sekretariat Daerah Aceh  |            |
| 46  | Renstra/Ro.Pemotda/46/2022  | Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah<br>Sekretariat Daerah Aceh            |            |
| 47  | Renstra/Romi/47/2022        | Biro Perekonomian Sekretariat Daerah Aceh                                  |            |
| 48  | Renstra/Ro.isra/48/2022     | Biro Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat<br>Sekretariat Daerah Aceh |            |
| 49  | Renstra/Ro. Organ/49/2022   | Biro Organisasi Sekretariat Daerah Aceh                                    |            |
| 50  | Renstra/Ro.Hukum/50/2022    | Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh   |            |
| 51  | Renstra/Ro. Adpem/51/2022   | Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat<br>Daerah Aceh                   |            |
| 52  | Renstra/Ro. Adpim/52/2022   | Biro Administrasi Pimpinan Sekretariat Daerah<br>Aceh                      |            |
| 53  | Renstra/Ro.PBJ/53/2022      | Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat<br>Daerah Aceh                  |            |
| 54  | Renstra/Sek.DPRA/54/2022    | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Aceh                                   |            |
| 56  | Renstra/Kesbangpol/55/2022  | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh                                     |            |

2

GUBERNUR ACEH,  


**NOVA IRIANSYAH**